



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDARISASI PENOMORAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan naskah dinas yang tertib secara administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan standarisasi penomoran naskah dinas pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI
PENOMORAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Defenisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Lembaga selain PD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan kegiatan berada di bawah pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah.
10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
11. Penomoran Naskah Dinas adalah informasi tertulis penomoran PD sebagai alat komunikasi nomor PD yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan Naskah Dinas.^k

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi PD dalam penyelenggaraan persuratan dan pengelolaan Naskah Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kearsipan dalam pengelolaan Naskah Dinas pada PD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penomoran Naskah Dinas;
- b. pencantuman nomor; dan
- c. pengelolaan nomor.

BAB II

PENOMORAN NASKAH DINAS

Pasal 5

- (1) Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. nomor kode klasifikasi;
 - b. nomor urut surat;
 - c. nomor kode PD;
 - d. nomor kode perjanjian; dan
 - e. tahun pembuatan.
- (2) Nomor kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicantumkan sesuai permasalahan dan substansi Naskah Dinas dengan berpedoman pada kode klasifikasi kearsipan.
- (3) Kode klasifikasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Nomor urut surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan sesuai dengan urutan kronologis dalam buku surat keluar PD. 

- (5) Nomor kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dicantumkan sesuai dengan kode PD/UPTD/Cabang Dinas pengolah Naskah Dinas.
- (6) Kode PD/UPTD/Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Nomor kode perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dicantumkan pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan perjanjian.
- (8) Tahun pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dicantumkan sesuai dengan tahun pembuatan pada Naskah Dinas yang berbentuk perjanjian.

BAB III

PENCANTUMAN NOMOR

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pencantuman nomor Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disesuaikan dengan bentuk dan susunan Naskah Dinas.
- (2) Tata cara pencantuman nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berurutan dengan dipisahkan tanda garis miring (/) dan letaknya disesuaikan dengan format Naskah Dinas.
- (3) Teknik pencantuman nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 7

Penomoran terhadap Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dan instruksi Gubernur dicantumkan secara berurutan yang meliputi:

- a. nomor kode klasifikasi;
- b. nomor urut surat; dan
- c. nomor kode PD.

Pasal 8

- (1) Penomoran terhadap Naskah Dinas dengan bentuk dan susunan perjanjian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur, penomoran dicantumkan secara berurutan, meliputi:
 1. kode klasifikasi;
 2. nomor urut;
 3. nomor kode perjanjian; dan
 4. tahun pembuatan.
 - b. perjanjian yang ditandatangani oleh pimpinan PD atas nama Gubernur dalam kedudukan dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, penomoran dicantumkan secara berurutan, meliputi:
 1. nomor kode klasifikasi;
 2. nomor urut surat;
 3. nomor kode PD; dan
 4. tahun pembuatan.
- (2) Nomor kode perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGELOLAAN NOMOR

Pasal 9

Pengelolaan nomor Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dan instruksi Gubernur menjadi tugas, tanggungjawab dan fungsi ketatausahaan pada PD dengan memperhatikan prinsip koordinasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 10

Pengelolaan nomor Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan PD atas nama Gubernur menjadi tugas dan tanggungjawab dari unit pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang pemerintahan

Pasal 11

- (1) Penomoran Naskah Dinas pada UPTD/Cabang Dinas dan lembaga selain PD ditetapkan oleh masing-masing UPTD/Cabang Dinas dan lembaga bersangkutan.
- (2) Nomor kode PD yang tercantum dalam penomoran Naskah Dinas pada UPTD/Cabang Dinas dan lembaga selain PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh PD induk.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

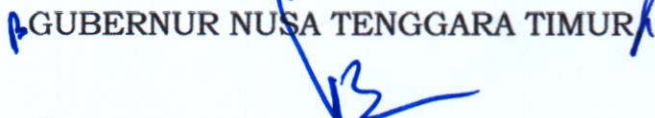
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

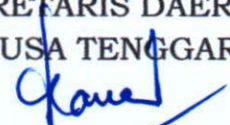
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 JUNI 2023

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 29 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JUNI 2023
TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP

000	UMUM	
	000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
		000.1.1 Telekomunikasi
		000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
		000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
		000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
		000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
		000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
		000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
		000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
		000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
		000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya
		000.1.5 Rapat pimpinan
		000.1.6 Penyediaan Konsumsi
		000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
		000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
		000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
		000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
		000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
		000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
		000.1.8.2 Penghijauan
		000.1.8.3 Perbaikan Gedung
		000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
		000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
		000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
		000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
		000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
		000.1.9.2 Pemasangan
		000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
		000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
		000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
		000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
		000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
	000.2	PERLENGKAPAN
		000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
		000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
		000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
		000.2.2 Pemeliharaan Peralatan kantor
		000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
		000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
		000.2.3 Distribusi
		000.2.3.1 Barang habis pakai
		000.2.3.2 Barang milik daerah

		000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
		000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
	000.3	PENGADAAN	
		000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
		000.3.2	Pengadaan Langsung, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak
		000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak
		000.3.4	Swakelola, antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
		000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa
		000.3.6	Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi
	000.4	PERPUSTAKAAN	
		000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		000.4.2	Deposit Bahan Pustaka
		000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
		000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
		000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
		000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
		000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
		000.4.3	Koleksi Pustaka
		000.4.3.1	Pembelian
		000.4.3.2	Hibah
		000.4.3.3	Hadiah
		000.4.3.4	Tukar Menukar
		000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
		000.4.3.6	Terbitan Internal
		000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
		000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
		000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka
		000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi
		000.4.6	Layanan Perpustakaan
		000.4.6.1	Keanggotaan
		000.4.6.2	Peminjaman
		000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
		000.4.7	Kerjasama Perpustakaan
		000.4.7.1	MoU
		000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
		000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
		000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
		000.4.8.1	Pengembangan situs web
		000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
		000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
		000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepastakaan digital

	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
	000.4.10	Konservasi
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
	000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
	000.4.12	Transformasi Digital
	000.4.13	Kurasi Digital
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5	KEARSIPAN	
	000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
	000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis
	000.5.3.1	Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik
	000.5.3.4	Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis
	000.5.4	Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital

f

		000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga
		000.5.6	Penyusutan Arsip
		000.5.6.1	Pemindahan Arsip, antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan
		000.5.6.2	Pemusnahan Arsip, meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan
		000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis, meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan
		000.5.7	Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan
		000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
		000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
		000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
		000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis
		000.5.9.1	Akuisisi, meliputi: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan
		000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
		000.5.9.3	Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip
		000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis
		000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
		000.5.9.6	Preservasi Preventif, antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
		000.5.9.7	Preservasi Kuratif
		000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis
		000.5.9.9	Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber
		000.5.10	Jasa Kearsipan, antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip
		000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN
		000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
		000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
		000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup

	000.5.15	Pengawasan Kearsipan
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
	000.5.15.3	Sanksi
000.6	PERSANDIAN	
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.6.2	Pengamanan persandian
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
	000.6.3.3	Pelaksanaan
	000.6.3.4	Pelaporan
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
	000.6.5.7	Pelaporan
000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
	000.7.1.6	Musrenbang Desa
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	000.7.2.6	Program kerja tahunan
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
	000.7.2.8	Laporan Berkala
	000.7.2.9	Laporan Insidental
	000.7.2.10	Evaluasi Program
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah

		000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
		000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan
		000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
		000.7.7.2	Pendanaan Daerah
		000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
		000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
		000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
	000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
		000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		000.8.1.1	Pembentukan
		000.8.1.2	Pengubahan
		000.8.1.3	Pembubaran
		000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja
		000.8.2.1	Analisa Jabatan
		000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
		000.8.3	Ketatalaksanaan
		000.8.3.1	Proses Bisnis
		000.8.3.2	Standar Pelayanan
		000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
		000.8.3.4	Pelayanan Publik
		000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
		000.8.5	Evaluasi Kelembagaan
		000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
		000.8.6.1	Budaya Kerja
		000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
		000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN	
		000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
		000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi
		000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan
		000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
		000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		000.9.6.1	Data
		000.9.6.2	Statistik
		000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
		000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
		000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
		000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop
100	PEMERINTAHAN		
	100.1	OTONOMI DAERAH	
		100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan,

f

		100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
		100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
		100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
		100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
		100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang
		100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
		100.1.4.5	Assosiasi Daerah
		100.1.5	Otonomi khusus dan daerah istimewa
		100.1.6	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
		100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		100.1.6.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
		100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
		100.1.7	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
	100.2	PEMERINTAHAN UMUM	
		100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama
		100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
		100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
		100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
		100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
		100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
		100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan
		100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
		100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
		100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
	100.3	HUKUM	
		100.3.1	Program Legislasi
		100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
		100.3.1.2	Program Legislasi
		100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
		100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
		100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
		100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
		100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
		100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
		100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten

		100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
		100.3.4	Instruksi/Surat Edaran
		100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
		100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
		100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
		100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
		100.3.5	Surat Perintah
		100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
		100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
		100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
		100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
		100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
		100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
		100.3.7.1	Dalam Negeri
		100.3.7.2	Luar Negeri
		100.3.8	Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi
		100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
		100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
		100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum
		100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
		100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
		100.3.11.3	Tata Usaha Negara
		100.3.11.4	Perburuhan
		100.3.11.5	Arbitrase
		100.3.11.6	Sengketa Adat
		100.3.12	Perjinaan
		100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
		100.3.13.1	Hak Cipta
		100.3.13.2	Hak Paten
		100.3.13.3	Hak Desain Industri
		100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
		100.3.13.5	Hak Merk
		100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak
200	POLITIK		
	200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
		200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
		200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
		200.1.2.3	Bela Negara
		200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
		200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
		200.1.3	Kewaspadaan Nasional
		200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
		200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
		200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan

		200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
		200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
		200.1.4.1	Ketahanan Seni
		200.1.4.2	Ketahanan Budaya
		200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
		200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
		200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
		200.1.4.6	Fasilitasi
		200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
		200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
		200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
		200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
		200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
	200.1.5	Politik Dalam Negeri	
		200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
		200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
		200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
		200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
		200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
		200.1.5.6	Pemerintah Daerah
		200.1.5.7	Database Parpol
		200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
		200.1.5.9	Pemilihan Umum
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
		200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
		200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	PEMILU		
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
		200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
		200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
		200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
		200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
		200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
		200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
		200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon
		200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
		200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
		200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
		200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
		200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
		200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan

	200.2.5	Pencalonan Pemilu
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
	200.2.6	Kampanye Pemilu
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
	200.2.7	Dana Kampanye
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
	200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
	200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu
	200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
	200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
	300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
	300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja
	300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
	300.1.4	Perlindungan Masyarakat
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
	300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN
	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
	300.2.2.1	Rencana dan standarisasi dan pengawakan dan perbekalan
	300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
	300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
	300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
	300.2.2.5	Perencanaan dan standarisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
	300.2.2.6	Registrasi BEACON
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan

		300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
		300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
		300.2.8	Operasi Komunikasi
		300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
		300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
		300.2.8.3	Registrasi BEACON
		300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan
		300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi
		300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi
		300.2.12	Pelapooran dan Evaluasi
		300.2.12.1	Laporan Harian
		300.2.12.2	Laporan Bulanan
		300.2.12.3	Laporoan Tahunan
		300.2.12.4	Evaluasi
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	
		400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh
		400.1.2	Pembangunan Sumber Daya
		400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup
		400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan Inovasi
		400.1.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.7	Pemantauan dan Evaluasi
		400.1.3	Peningkatan Infrastruktur
		400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur
		400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam Peningkatan Infrastruktur
		400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur
		400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur
		400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam Peningkatan Infrastruktur
		400.1.3.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur
		400.1.3.7	Pemantauan dan Evaluasi
		400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
		400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
		400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
		400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
		400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
		400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
		400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
		400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
		400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
		400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal

		400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
		400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
		400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
		400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
		400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
	400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
		400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
		400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
		400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
		400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
		400.1.5.5	Ketenagakerjaan
		400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
		400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
		400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
		400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
		400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
		400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
		400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
		400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
		400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
		400.2.2.1	Data gender
		400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
		400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
		400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
		400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
		400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
		400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
		400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
		400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
		400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
		400.2.4.2	Data perlindungan anak
		400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
		400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
		400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
		400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
		400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
		400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak

		400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
		400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
	400.2.6		Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
	400.2.7		Penghargaan Kabupaten Layak Anak
	400.2.8		Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
400.3	PENDIDIKAN		
	400.3.1		Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.3.2		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
		400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
		400.3.2.2	Pelatihan Sosial
		400.3.2.3	Peringatan Hari anak
		400.3.2.4	Block Grant
	400.3.3		Pendidikan Masyarakat
		400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
		400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
		400.3.3.3	Pembinaan Program
		400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
		400.3.3.5	Pameran
		400.3.3.6	Rakor
		400.3.3.7	Sosialisasi
		400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
	400.3.4		Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
	400.3.5		Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
		400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
		400.3.5.2	Block Grant
		400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
		400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
		400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
		400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
	400.3.6		Pendidikan khusus/Layanan Khusus
		400.3.6.1	Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran
		400.3.6.2	Block Grant
		400.3.6.3	Lomba, Festival
		400.3.6.4	Sosialisasi, Bimtek
		400.3.6.5	Pendataan
		400.3.6.6	Kelembagaan
	400.3.7		Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
		400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
		400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
		400.3.7.3	Sertifikasi Guru
		400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
		400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
		400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
		400.3.7.7	Block Grant
	400.3.8		Sekolah Menengah Atas
		400.3.8.1	Kurikulum
		400.3.8.2	Bahan Ajar
		400.3.8.3	Pelatihan
		400.3.8.4	Block grant
		400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
		400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
		400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
		400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
	400.3.9		Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
		400.3.9.1	Bahan ajar
		400.3.9.2	Petunjuk Teknis
		400.3.9.3	Block grant

		400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
		400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
		400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
		400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
		400.3.9.8	Pendataan
		400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
		400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik
		400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
		400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
		400.3.10.3	Setifikasi Guru
		400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
		400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
		400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
		400.3.10.7	Block grant
		400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
		400.3.11	Penilaian Pendidikan
		400.3.11.1	Penilaian Akademik
		400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
		400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
		400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan
		400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
		400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
		400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan
		400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
		400.3.13.2	Sarana Pendidikan
		400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
	400.4	KEOLAHRAGAAN	
		400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan
		400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
		400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
		400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi
		400.4.3.1	Olahraga Massal
		400.4.3.2	Olahraga Tradisional
		400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
		400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
		400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
		400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
		400.4.4.3	Olahraga Prestasi
		400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
		400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
		400.4.5.1	Olahraga Tradisional
		400.4.5.2	Layanan Khusus
		400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
		400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
		400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
		400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga
		400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
		400.4.7.2	Kompetisi
		400.4.7.3	IPTEK Olahraga
		400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
		400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
		400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
		400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga
		400.4.9.1	Industri Olahraga



		400.4.9.2	Promosi Olahraga
		400.4.10	Olahraga Prestasi
		400.4.10.1	Daerah
		400.4.10.2	Nasional
		400.4.10.3	Internasional
		400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
		400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
		400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
		400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
	400.5	KEPEMUDAAN	
		400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
		400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
		400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
		400.5.2.3	Pengembangan
		400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda
		400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
		400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
		400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
		400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda
		400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
		400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
		400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
		400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
		400.5.5.1	Pengkajian
		400.5.5.2	Pengembangan
		400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
		400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
		400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
		400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
		400.5.7	Kewirausahaan
		400.5.7.1	Kelembagaan
		400.5.7.2	Pengaderan
		400.5.7.3	Perintisan
		400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
		400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
		400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
		400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
		400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
		400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
		400.5.9.1	Standardisasi
		400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
		400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
		400.5.10.1	Kemitraan
		400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
	400.6	KEBUDAYAAN	
		400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
	400.6.2.1	Registrasi Nasional
	400.6.2.2	Pelindungan
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya
	400.6.4.1	Sejarah
	400.6.4.2	Pemetaan nilai
	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
	400.6.5.2	Kekayaan budaya
	400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
	400.6.5.4	Diplomasi budaya
400.7	KESEHATAN	
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar
	400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
	400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
	400.7.2.9	Pembiayaan darah
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
	400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar

		400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
		400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
		400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
		400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
	400.7.5		Penunjang medik dan sarana kesehatan
		400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
		400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
		400.7.5.3	Radiologi
		400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
		400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
		400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
		400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
	400.7.6		Kesehatan Jiwa
		400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
		400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
		400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
		400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
		400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
		400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
	400.7.7		Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
		400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
		400.7.7.2	Imunisasi
		400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
		400.7.7.4	Kesehatan matra
	400.7.8		Pengendalian penyakit menular langsung
		400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
		400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
		400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
		400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
		400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
	400.7.9		Pengendalian penyakit bersumber binatang
		400.7.9.1	Pengendalian malaria
		400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
		400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
		400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
	400.7.10		Pengendalian penyakit tidak menular
		400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
		400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
		400.7.10.3	Penyakit kanker
		400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
		400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
	400.7.11		Penyehatan lingkungan
		400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
		400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
		400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
		400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
		400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
	400.7.12		Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
	400.7.13		Gizi
		400.7.13.1	Gizi makro
		400.7.13.2	Gizi mikro
		400.7.13.3	Gizi klinik dan dietetik
		400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
		400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
	400.7.14		Kesehatan ibu
		400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil

		400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
		400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
		400.7.14.4	Keluarga berencana
		400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
	400.7.15		Kesehatan anak
		400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
		400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
		400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
		400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
		400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
	400.7.16		Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
		400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
		400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
		400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
		400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
	400.7.17		Kesehatan kerja dan Olah raga
		400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
		400.7.17.2	Kapasitas kerja
		400.7.17.3	Lingkungan kerja
		400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
		400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
		400.7.17.6	Kesehatan olahraga
	400.7.18		Obat Publk dan perbekalan kesehatan
		400.7.18.1	Harga obat publik
		400.7.18.2	Pengadaan obat
		400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
	400.7.19		Produksi dan distribusi alat kesehatan
		400.7.19.1	Alat kesehatan
		400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
		400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	400.7.20		Kefarmasian
		400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
		400.7.20.2	Farmasi klinis
		400.7.20.3	Farmasi Komunitas
		400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
	400.7.21		Produksi dan distribusi kefarmasian
		400.7.21.1	Obat tradisional
		400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
		400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
		400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
	400.7.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
		400.7.22.1	Surat keterangan
		400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
	400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan
		400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
		400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
		400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
		400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
		400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
	400.7.24		Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
		400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
		400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
	400.7.25		Intelegensia Kesehatan
		400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan

		400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
	400.7.26		Kesehatan Haji
		400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
		400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
	400.7.27		Promosi Kesehatan
		400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
		400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
		400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
		400.7.27.4	Hari kesehatan
	400.7.28		Data dan Informasi
		400.7.28.1	Statistik kesehatan
		400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
		400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
	400.7.29		Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
		400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
		400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
		400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
		400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
	400.7.30		Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
		400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
		400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
		400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
		400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
		400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
	400.7.31		Rekam Medis
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN		
	400.8.1		Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.8.2		Fasilitas
		400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota
		400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
		400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
		400.8.2.4	Kasus Keagamaan
		400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
	400.8.3		Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
		400.8.3.1	Kelembagaan dan Kepercayaan
		400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
		400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
		400.8.3.4	Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional
		400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL		
	400.9.1		Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.9.2		Kesejahteraan Sosial Anak
		400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
		400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
		400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
		400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
		400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus

	400.9.3	Rehabilitasi Sosial
	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara,
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
	400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
	400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
	400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
	400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
	400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerjasama
	400.9.11	Jaminan Sosial
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerjasama
	400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
	400.9.13.3	Penggalan dan pengembangan potensi
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas

		400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
		400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
		400.9.14.5	Bantuan Langsung
		400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
	400.9.15		Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial
		400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
		400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan
		400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
		400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
	400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
		400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
		400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
		400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
		400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
		400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
		400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
		400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
		400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
		400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
		400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
		400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
		400.10.4.1	Budaya Nusantara
		400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
		400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
		400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
		400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat
		400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
		400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
		400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
		400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
		400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
		400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
		400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
		400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
		400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
		400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
		400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
		400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
	400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	
		400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		400.11.2	Pertamanan
		400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
		400.11.2.2	Taman Kota
		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
		400.11.3	Pemakaman
		400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
		400.11.3.2	Pemakaman
		400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman
		400.11.4	Jalur Hijau

		400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
		400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
		400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
	400.11.5		Peran Serta Masyarakat
	400.11.6		Pengawasan dan Penindakan
	400.11.7		Pengelolaan Data
	400.11.8		Evaluasi dan Pelaporan
	400.12		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	400.12.1		Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
	400.12.2		Pendaftaran Penduduk
		400.12.2.1	Identitas Penduduk
		400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
		400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
		400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
		400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.3		Pencatatan Sipil
		400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
		400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
		400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan
		400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
		400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.4		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
		400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.5		Pengembangan Kebijakan Kependudukan
		400.12.5.1	Kuantitas Penduduk
		400.12.5.2	Kualitas Penduduk
		400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
		400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
		400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
	400.12.6		Penyerasian Kependudukan
		400.12.6.1	Indikator Kependudukan
		400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
		400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
		400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
		400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
	400.13		KELUARGA BERENCANA
	400.13.1		Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.13.2		Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
		400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data
		400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan
	400.13.3		Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
		400.13.3.1	Penyiapan fasilitas
		400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan
	400.13.4		Profil dan proyeksi penduduk
		400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk
		400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk

	400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk
	400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
	400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
	400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
	400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
	400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
	400.13.7	Pengembangan Sistem
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.8	Pengembangan Materi
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.10	Analisis Sosial
	400.13.11	Analisis Ekonomi
	400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
	400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
	400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
	400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
	400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
	400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
	400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
	400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria
	400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
	400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
	400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
	400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
	400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
	400.13.26	Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
	400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
	400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
	400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak

	400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja
	400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
	400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
	400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
	400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja
	400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
	400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
	400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
	400.13.31	Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
	400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
	400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
	400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
	400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.41	Advokasi dan pencitraan
	400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
	400.13.42.1	Promosi
	400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi
	400.13.42.3	Produk media komunikasi
	400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
	400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

	400.13.46	Tenaga Lini Lapangan
	400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
	400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
	400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan
	400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
	400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
	400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan
	400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data
	400.13.51	Analisis dan evaluasi
	400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
	400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
	400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data
	400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
	400.13.52.2	Pengelolaan bank data
	400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi
	400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
	400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
	400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT	
	400.14.1	Keprotokolan
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-
	400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
	400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
	400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
	400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat
	400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media
	400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
	400.14.4.1	Kliping koran
	400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat
	400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan
	400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja
	400.14.5.5	Forum Kehumasan
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
	400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal
	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
	400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan
	400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500	PEREKONOMIAN
500.1	KETAHANAN PANGAN
	500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
	500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
	500.1.2.2 Akses Pangan
	500.1.2.3 Kerawanan Pangan
	500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
	500.1.3.1 Distribusi Pangan
	500.1.3.2 Harga Pangan
	500.1.3.3 Cadangan Pangan
	500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
	500.1.4.1 Konsumsi Pangan
	500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
	500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
	500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
	500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
	500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan
	500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
	500.1.7 Bimbingan Teknis
	500.1.8 Evaluasi
500.2	PERDAGANGAN
	500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
	500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
	500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdagangan
	500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
	500.2.2.4 Informasi Perusahaan
	500.2.2.5 Pelaku Pasar
	500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14 Informasi Pasar
	500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16 Barang Strategis
	500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
	500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4 Tata usaha
	500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan
	500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri
	500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan

		500.2.3.11	Jasa
		500.2.3.12	Kerjasama
		500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
		500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
		500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
		500.2.3.16	Pengawasan
		500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
		500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi	
		500.2.4.1	Pengkajian pasar
		500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
		500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
		500.2.4.4	Pengkajian pasar
		500.2.4.5	Pengembangan Pasar
		500.2.4.6	Sistem informasi
		500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
		500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
		500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
	500.2.5	Bimbingan Teknis	
	500.2.6	Evaluasi	
	500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	
		500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
		500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
		500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
		500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.3	Produksi	
		500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
		500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
		500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
		500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
	500.3.4	Pembiayaan	
		500.3.4.1	Program Pendanaan
		500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
		500.3.4.3	Urusan Permodalan
		500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
		500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
		500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
	500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
		500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
		500.3.5.2	Ekspor dan Impor
		500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
		500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
		500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
		500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
	500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
		500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
		500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
		500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
		500.3.6.5	Advokasi
	500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
		500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
		500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
		500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)

		500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UMKK
		500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
	500.3.8		Pengkajian Sumber Daya UMKK
		500.3.8.1	Penelitian Koperasi
		500.3.8.2	Penelitian UKM
		500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
		500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
	500.3.9		Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
	500.3.10		Pedagang Kaki Lima (PKL)
		500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
		500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
	500.3.11		Monitoring dan Evaluasi
	500.4	KEHUTANAN	
		500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.4.2	Penyuluhan
		500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
		500.4.2.2	Materi Penyuluhan
		500.4.2.3	Program Penyuluhan
		500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
		500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
		500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
		500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
		500.4.2.8	Deseminasi
		500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
		500.4.3	Planologi Kehutanan
		500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
		500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
		500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
		500.4.3.4	Penguksuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
		500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
		500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
		500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
		500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
		500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
		500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
		500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
		500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
		500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
		500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
		500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
		500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
		500.4.4	Bina Usaha Kehutanan
		500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
		500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
		500.4.4.3	Kerjasama
		500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
		500.4.4.5	Perpanjangan
		500.4.4.6	Modal dan Peralatan
		500.4.4.7	Investasi Industri
		500.4.4.8	Peralatan
		500.4.4.9	Tenaga Kerja
		500.4.4.10	Pemegang Saham
		500.4.4.11	Neraca Perusahaan
		500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
		500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)

		500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
		500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
		500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
		500.4.4.17	Produksi Kayu
		500.4.4.18	Produksi non kayu
		500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
		500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
		500.4.4.21	Industri Non Kayu
		500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
		500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
		500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
		500.4.4.25	Pemblokiran
		500.4.4.26	Denda
		500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
		500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
		500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
		500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
		500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
		500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
		500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
		500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
		500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
		500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
		500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
		500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
		500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
		500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
		500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
		500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
		500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
		500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
		500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
		500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
		500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
		500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
		500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
	500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
		500.4.5.1	Standardisasi
		500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
		500.4.5.3	Pengembangan
		500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
		500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
		500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
		500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
		500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
		500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
		500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
		500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
	500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
		500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
		500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
		500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
		500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
		500.4.6.5	Kawasan Konservasi

		500.4.6.6	Pengamanan Hutan
		500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
		500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
		500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
		500.4.6.11	Bina Cinta Alam
		500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
		500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
		500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
		500.4.7.1	Pengelolaan Benih
		500.4.7.2	Kebun Benih
		500.4.7.3	Tegakan Benih
		500.4.7.4	Pengadaan Benih
		500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
		500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
		500.4.7.7	Pembibitan
		500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
		500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
		500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
		500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
		500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
		500.4.7.14	Perhutanan Sosial
		500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
		500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
		500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
		500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
		500.4.8.3	Diseminasi
		500.4.8.4	Gelar Teknologi
		500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
	500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.5.2	Perikanan Tangkap
		500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
		500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
		500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
		500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
		500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
		500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
		500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
		500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
		500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
		500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
		500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
		500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
		500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
		500.5.2.14	Kenelayanan
		500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
		500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
		500.5.3	Perikanan Budidaya
		500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
		500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
		500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar

		500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
		500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
		500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
		500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
		500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
		500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
		500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
		500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
		500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
		500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
		500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
		500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
		500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
	500.5.4		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
		500.5.4.2	Pengembangan Produk
		500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		500.5.4.4	Industri Pengolahan
		500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
		500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
		500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
		500.5.4.8	Pengembangan Industri
		500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
		500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
		500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
		500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
		500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
		500.5.4.18	Pengembangan Impor
		500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
		500.5.4.20	Pelayanan Usaha
		500.5.4.21	Kemitraan Usaha
		500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
		500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
		500.5.4.24	Informasi dan Promosi
	500.5.5		Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
		500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
		500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
		500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
		500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
		500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
		500.5.5.6	Konservasi Wawasan
		500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
		500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
		500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
		500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
		500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
		500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
		500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
		500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
		500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
		500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil

		500.5.5.17	Akses Permodalan
		500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
		500.5.5.20	Pengembangan Usaha
	500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
		500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
		500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
		500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
		500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
		500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
		500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
		500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
		500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
		500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
		500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
		500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
		500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
		500.5.6.13	Sistem Pemantauan
		500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
		500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
		500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
		500.5.6.17	Penyidikan
		500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
		500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
		500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
	500.5.7	Karantina Ikan	
		500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
		500.5.7.2	Penahanan
		500.5.7.3	Pengasingan
		500.5.7.4	Pengamatan
		500.5.7.5	Pengakuan
		500.5.7.6	Penolakan
		500.5.7.7	Pemusnahan
		500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
		500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
		500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
		500.5.7.11	Pemasukan Formulir
		500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
		500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
		500.5.7.14	Surat Perintah
		500.5.7.15	Rekomendasi
		500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
		500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
		500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
		500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
		500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
		500.5.7.21	Lokasi Karantina
	500.6	PERTANIAN	
		500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.6.2	Perlindungan hortikultura
		500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
		500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
		500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
		500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis

	500.6.3	Perbenihan Hortikultura
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan
	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
	500.6.7	Pupuk Pestisida
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
	500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
	500.6.10	Budidaya Serealia
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
	500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
	500.6.12	Tanaman Pangan
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
	500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
	500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Hortikultura

		500.6.14.3	Perkebunan
		500.6.14.4	Peternakan
	500.6.15		Mutu dan Standarasi
		500.6.15.1	Standardisasi
		500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
		500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
		500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
	500.6.16		Pengembangan Usaha dan Investasi
		500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
		500.6.16.2	Investasi
		500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
		500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
	500.6.17		Pemasaran Domestik
		500.6.17.1	Informasi Pasar
		500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
		500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
		500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
	500.6.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
	500.6.19		Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
		500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
		500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
	500.6.20		Diseminasi
	500.6.21		Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
		500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
		500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
	500.6.22		Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
	500.6.23		Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
	500.6.24		Data Penelitian dan Pengembangan
	500.6.25		Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
	500.6.26		Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
		500.6.26.1	Hak Cipta
		500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
		500.6.26.3	Hak Paten Biasa
		500.6.26.4	Hak Merek
		500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
		500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
		500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
	500.6.27		Pelayanan Perijinan Pertanian
		500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
		500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
		500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
	500.6.28		Pelayanan Hukum
		500.6.28.1	Sertifikasi
		500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
	500.6.29		Karantina Pertanian
		500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
		500.6.29.2	Karantina Hewan
	500.6.30		Bimbingan Teknis
	500.6.31		Evaluasi

500.7	PETERNAKAN	
	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
	500.7.2.2	Pakan Ternak
	500.7.2.3	Budidaya Ternak
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
	500.7.3	Bimbingn Teknis
	500.7.4	Evaluasi
500.8	PERKEBUNAN	
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.8.2	Tanaman Semusim
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
	500.8.3	Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.4	Tanaman Tahunan
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan

		500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
		500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
		500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan
		500.8.8	Evaluasi Perkebunan
	500.9	PERINDUSTRIAN	
		500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama
		500.9.2.1	Industri Manufaktur
		500.9.2.2	Industri Agro
		500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.3	Promosi Industri
		500.9.3.1	Industri Manufaktur
		500.9.3.2	Promosi Industri Agro
		500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.4	Standarisasi dan Teknologi
		500.9.4.1	Industri Manufaktur
		500.9.4.2	Industri Agro
		500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual
		500.9.5.1	Industri Manufaktur
		500.9.5.2	Industri Agro
		500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.6	Industri Hijau
		500.9.6.1	Industri Manufaktur
		500.9.6.2	Industri Agro
		500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
		500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
		500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
		500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
		500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
		500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
		500.9.12	Standarisasi
		500.9.12.1	Standar
		500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
		500.9.12.3	Infrastruktur Standar
		500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
		500.9.13.1	Kebijakan Industri
		500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
		500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
		500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
		500.9.14.1	Industri Hijau
		500.9.14.2	Lingkungan Hidup
		500.9.14.3	Energi
		500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
		500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
		500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
		500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
		500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
	500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	

		500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.10.2	Rekomendasi Kegeologian
		500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
		500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
		500.10.2.3	Pertambangan
		500.10.2.4	Panas Bumi
		500.10.2.5	Geosains
		500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
		500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
		500.10.3	Penelitian Kegeologian
		500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
		500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
		500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
		500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
		500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
		500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
		500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
		500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
		500.10.3.9	Survei Geologi
		500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
		500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
		500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
		500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
		500.10.4.4	Survei Geologi
		500.10.4.5	Konservasi
		500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
		500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
		500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
		500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
		500.10.5.4	Survei Geologi
		500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
		500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
		500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
		500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
		500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
		500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
		500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
		500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
		500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
		500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
		500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan



		500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/ Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu <u>Minyak dan Gas Bumi</u>
		500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
		500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
		500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
		500.10.7.7	Partisipasi Interest
		500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
		500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
		500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha
		500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
		500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
		500.10.9	Teknik dan Lingkungan
		500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
		500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
		500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
		500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
		500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
		500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
		500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
		500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
		500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
		500.10.9.10	Usaha penunjang
		500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

f

		500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
		500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
		500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
		500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
		500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
		500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
		500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
		500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
		500.10.12	Panas Bumi
		500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
		500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
		500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
		500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
		500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
		500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
		500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specification (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
		500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
		500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
		500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
		500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
		500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
		500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
		500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
		500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
		500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
		500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
		500.10.13	Bioenergi
		500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
		500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
		500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
		500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
		500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
		500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
		500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
		500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
		500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
		500.10.14	Aneka Energi
		500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
		500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
		500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

		500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
		500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.15	Konservasi Energi	
		500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
		500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
		500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
		500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
		500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
		500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
		500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
		500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
		500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
		500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
	500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
		500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
		500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
		500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
	500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
		500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
		500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
		500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
	500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan	
		500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin
		500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
		500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
		500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
	500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
		500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
		500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan

f

		500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
		500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
		500.10.20	Sertifikasi
		500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
		500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
		500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
		500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
		500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
		500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan
		500.10.22	Standarisasi Kompetensi
		500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
		500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
		500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
		500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
		500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
		500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
		500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
		500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
		500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
		500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
		500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
		500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara
		500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
		500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
		500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
		500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
		500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
		500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
		500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
		500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
		500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
		500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral
		500.10.26.1	Ketenagakerjaan
		500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
		500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
		500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
		500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral

		500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
		500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
		500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
		500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
		500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
		500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
		500.10.26.12	Teguran kepada pengusaha Kontrak Karya (KK)
		500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
		500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
		500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
		500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
		500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
		500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara
		500.10.27.1	Ketenagakerjaan
		500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
		500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
		500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
		500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
		500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
		500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
		500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
		500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara
		500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
		500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
		500.10.27.12	Teguran kepada pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
		500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
		500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
		500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
		500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
		500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
		500.10.28	Penerimaan Negara
		500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
		500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
		500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

f

		500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
		500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
		500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
		500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
		500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi
		500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
		500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
		500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
		500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
		500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi
		500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
		500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
		500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
		500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
		500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis
		500.10.29.16	Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis
		500.10.29.17	Pengawasan Teknis
		500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
		500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan
		500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan
		500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
		500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
		500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe
		500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi

g

		500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
		500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
		500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
	500.10.31	Sarana Litbang	
		500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
		500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
	500.10.32	Afiliasi	
		500.10.32.1	Proyek Percontohan
		500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
		500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
		500.10.32.4	Penyajian Informasi
	500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
		500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
		500.10.33.2	Energi Kelautan dan Wilayah Penelitian Energi dan wilayah pantai
		500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
		500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
	500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
		500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
		500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
		500.10.34.3	Laboratorium
		500.10.34.4	Study
		500.10.34.5	Teknologi Proses
		500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
		500.10.34.7	Teknologi Gas
	500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
		500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
		500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
		500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
	500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
		500.10.36.1	Energi baru terbarukan
		500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
		500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
		500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
	500.11	PERHUBUNGAN	
		500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan
		500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang

		500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
		500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
		500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
		500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
		500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
		500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
		500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
		500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
	500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
		500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
		500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
	500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor	
		500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
		500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
		500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
		500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
	500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
		500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
		500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
		500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
		500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
	500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
		500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
		500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
	500.11.7	Perlengkapan Jalan	
		500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
		500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
		500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
		500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
		500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
	500.11.8	Angkutan Penumpang	
		500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
		500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
		500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
		500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat
		500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
		500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
		500.11.8.7	Angkutan perintis
		500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
	500.11.9	Angkutan Barang	
		500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
		500.11.9.2	Tarif angkutan barang
		500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
		500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
		500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
	500.11.10	Monitoring Operasional	
		500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan

		500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
	500.11.11		Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		500.11.11.1	Pedoman Teknis
		500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		500.11.11.3	Bimtek PPNS
		500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.12		Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
		500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
	500.11.13		Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
		500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.14		Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.15		Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
	500.11.16		Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.16.2	Pemberian sertifikat pelabuhan penyeberangan
		500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
		500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.17		Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.18		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
		500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
		500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
	500.11.19		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
		500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
		500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.20		Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
	500.11.21		Tarif dan Keperintisan

		500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
	500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	
		500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
		500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
		500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
		500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
		500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
		500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
	500.11.24	Angkutan Perkotaan	
		500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
		500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
		500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
		500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
		500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
		500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
		500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
		500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
		500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
		500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
		500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
		500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
	500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
		500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
		500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
		500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
		500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
		500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
	500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
		500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

	500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
	500.11.31	Audit Keselamatan
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.32	Inspeksi Keselamatan
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.33	Parkir
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.12.2	Telekomunikasi
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
	500.12.3	Penyiaran
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
	500.12.5	Pengendalian Informatika
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
	500.12.6	e- Government
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
	500.12.7	e- Business
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
	500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan

	500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
	500.12.10	Keamanan Informasi
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
	500.12.11	Komunikasi Publik
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
	500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
	500.12.13	Pengelolaan Media Publik
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
	500.12.14	Kemitraan Komunikasi
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
	500.12.15	Infrastruktur Informatika
	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3	Keamanan Informatika
	500.12.16	Sistem dan Data
	500.12.16.1	Portal dan Konten
	500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
	500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
	500.12.17	Pusat Kerjasama
	500.12.17.1	Kerja Sama daerah
	500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
	500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
	500.12.18.1	Pelayanan Informasi
	500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
	500.12.18.3	Bimbingan Teknis
	500.12.19	Evaluasi
500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata
	500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
	500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
	500.13.2.3	Industri Pariwisata
	500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
	500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

		500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
		500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
		500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
	500.13.5		Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
		500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
		500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
		500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
	500.13.6		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
		500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
	500.14	STATISTIK	
		500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
		500.14.2.1	Perencanaan
		500.14.2.2	Persiapan, antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
		500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
		500.14.2.4	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
		500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
		500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
	500.14.3		Survei
		500.14.3.1	Perencanaan
		500.14.3.2	Persiapan
		500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
		500.14.3.4	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
		500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, <u>Penyusunan publikasi</u>
		500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei

	500.14.4	Konsolidasil Data Statistik
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
	500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
500.15	KETENAGAKERJAAN	
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
	500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
	500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
	500.15.6	Bina Pemagangan
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
	500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
	500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
	500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyaluran dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
	500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
	500.15.11	Standardisasi Profesi

		500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
		500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
	500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
		500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
		500.15.12.2	Perjanjian Kerja
		500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
		500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
	500.15.13	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	
		500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
		500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
		500.15.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial
	500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
		500.15.14.1	Pengupahan
		500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
	500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
		500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
		500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
		500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
		500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
		500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
	500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
		500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
		500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
		500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
		500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
	500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
		500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
		500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
		500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
		500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
		500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
	500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	
	500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
		500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
		500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
		500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
	500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
		500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
		500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
		500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
		500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
	500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
		500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

		500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.16	PENANAMAN MODAL	
		500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal
		500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
		500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
		500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
		500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
		500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
		500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
		500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
		500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
		500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
		500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
		500.16.4	Promosi Penanaman Modal
		500.16.4.1	Pengembangan Promosi
		500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
		500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
		500.16.4.4	Promosi Sektoral
		500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
		500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
		500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal
		500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
		500.16.5.2	Kerja Sama Regional
		500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
		500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
		500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
		500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
		500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
		500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
		500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
		500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal
		500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
		500.16.7.2	Pelayanan Perijinan
		500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
		500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan
		500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
	500.17	PERTANAHAN	
		500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
		500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
		500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
		500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan
		500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian
		500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
		500.17.3.1	Penatagunaan Tanah
		500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik
		500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah
		500.17.4	Sengketa Tanah
		500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa
		500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian

	500.18	TRANSMIGRASI
		500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
		500.18.2.1 Fasilitas Pengadaan Tanah
		500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
		500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
		500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
		500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
		500.18.3.1 Penyiapan Lahan
		500.18.3.2 Penyiapan Sarana
		500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
		500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
		500.18.4 Fasilitas Penempatan Transmigrasi
		500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
		500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
		500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
		500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
		500.18.5 Partisipasi Masyarakat
		500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
		500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
		500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
		500.18.5.4 Pelayanan Investasi
		500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
		500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
		500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
		500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
		500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
		500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
		500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
		500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
		500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
		500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
		500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
		500.18.8 Pengembangan Usaha
		500.18.8.1 Kewirausahaan
		500.18.8.2 Produksi
		500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
		500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
		500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
		500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
		500.18.9.2 Pengembangan Sarana
		500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
		500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
		500.18.10 Penyerasian Lingkungan
		500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
		500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
		500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
		500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	
	600.1	PEKERJAAN UMUM
		600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
		600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
		600.1.2.2 Kelembagaan
		600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
		600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
		600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan

	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
	600.1.3.2	Manajemen Mutu
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)
	600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
	600.1.8	Pembangunan Jalan
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
	600.1.9	Preservasi Jalan
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
	600.1.10	Pengelolaan Jembatan
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
	600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
	600.1.12	Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol
	600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
	600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus



		600.1.14.5	Kelembagaan
		600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan
		600.1.15.1	Perencanaan Teknis
		600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
		600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
		600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
		600.1.15.5	Kelembagaan
		600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		600.1.16.1	Perencanaan Teknis
		600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
		600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
		600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
		600.1.16.5	Kelembagaan
		600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
		600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
		600.1.17.1	Perencanaan Teknis
		600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
		600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
		600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
		600.1.17.5	Kelembagaan
		600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
		600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi
	600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan
		600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
		600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
		600.2.2.3	Kemitraan
		600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan
		600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
		600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
		600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
		600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
		600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
		600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
		600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
		600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
		600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
		600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan
		600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
		600.2.5.2	Analisa Teknik
		600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
		600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
		600.2.6	Penyediaan Rumah Susun
		600.2.6.1	Perencanaan Teknik
		600.2.6.2	Penyediaan
		600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
		600.2.6.4	Pengelolaan
		600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus
		600.2.7.1	Perencanaan Teknik
		600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
		600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
		600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
		600.2.7.5	Perencanaan Teknik
		600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni



		600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
	600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
		600.2.8.1	Perencanaan Teknik
		600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
		600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
		600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
	600.2.9		Investasi Infrastruktur
		600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
		600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
		600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
		600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
	600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
		600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
		600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
		600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
		600.2.10.4	Manajemen Mutu
	600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
		600.2.11.1	Kelembagaan
		600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
		600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
		600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
	600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
		600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
		600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
		600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
		600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
	600.2.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
		600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
		600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi
		600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
		600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
	600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi
		600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
		600.2.15.2	Pengembangan Materi
		600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
		600.2.16.1	Antar Sektor
		600.2.16.2	Antar Wilayah
	600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis
		600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
		600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
	600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan
		600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
		600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
		600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
		600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
		600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.19		Pemantauan dan Evaluasi
	600.3		TATA RUANG (TATA KOTA)
		600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
		600.3.2	Perencanaan
		600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
		600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
		600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten

		600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
		600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
		600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
		600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
		600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian
		600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
		600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
		600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
		600.3.4	Pemetaan
		600.3.4.1	Peta Dasar
		600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
		600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
		600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
	600.4	LINGKUNGAN HIDUP	
		600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
		600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
		600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
		600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
		600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
		600.4.4	Ekonomi Lingkungan
		600.4.5	Dampak Lingkungan
		600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
		600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
		600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
		600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan
		600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
		600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
		600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
		600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
		600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan
		600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
		600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
		600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
		600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
		600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
		600.4.8.1	Pengembangan
		600.4.8.2	Pemanfaatan
		600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
		600.4.8.4	Keamanan Hayati
		600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
		600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
		600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
		600.4.9.2	Rawa
		600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
		600.4.10.1	Perangkat mitigasi
		600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
		600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
		600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
		600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim
		600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim



		600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
	600.4.12		Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
		600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
		600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
		600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.13		Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
		600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
		600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
		600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
		600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
	600.4.14		Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
		600.4.14.1	Pemantauan
		600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
	600.4.15		Pengelolaan Sampah
		600.4.15.1	Pembatasan sampah
		600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
		600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
		600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
	600.4.16		Hukum Administrasi Lingkungan
		600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
		600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
	600.4.17		Penyelesaian Sengketa Lingkungan
		600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
		600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
	600.4.18		Penegakan hukum pidana lingkungan
		600.4.18.1	Penyidikan
		600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
		600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
	600.4.19		Komunikasi Lingkungan
		600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
		600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
	600.4.20		Penguatan Inisiatif Masyarakat
		600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
		600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
	600.4.21		Peningkatan Peran Masyarakat
		600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
		600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
	600.4.22		Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
		600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
		600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
	600.4.23		Data dan Informasi Lingkungan
		600.4.23.1	Pengelolaan Data
		600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
		600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
		600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
	600.4.24		Kelembagaan Lingkungan
		600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
		600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
	600.4.25		Standarisasi dan teknologi
		600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
		600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
		600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
	600.4.26		Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
		600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Llingkungan
		600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700	PENGAWASAN		
	700.1	PENGAWASAN INTERNAL	
		700.1.1	Rencana Pengawasan



		700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
		700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
		700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
		700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
		700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
		700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan
		700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
		700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
		700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
		700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
		700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
		700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
		700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
		700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
		700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
800	KEPEGAWAIAN		
	800.1	SUMBER DAYA MANUSIA	
		800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
		800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan
		800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
		800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
		800.1.1.4	Standarisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
		800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
		800.1.2.1	Formasi ASN, antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
		800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
		800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
		800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
		800.1.2.5	Pengangkatan ASN
		800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
		800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
		800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
		800.1.3	Mutasi Pegawai
		800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
		800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan

		800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
		800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
		800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
		800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
		800.1.4	Pengembangan Karir
		800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
		800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
		800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
		800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		800.1.4.5	Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
		800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara
		800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
		800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
		800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
		800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
		800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
		800.1.6.2	Disiplin
		800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
		800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
		800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
		800.1.6.6	Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya
		800.1.7	Bantuan Hukum
		800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai
		800.1.8.1	Status Kepegawaian
		800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
		800.1.8.3	Keberatan Pegawai
		800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
		800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian
		800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
		800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
		800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
		800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
		800.1.10	Pengawasan dan pengendalian
		800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
		800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
		800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
		800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
		800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
		800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar
		800.1.11	Administrasi Pegawai
		800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
		800.1.11.2	Cuti Sakit
		800.1.11.3	Cuti Bersalin
		800.1.11.4	Cuti Tahunan

		800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
		800.1.11.6	Cuti Besar
		800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
		800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
		800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
		800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
		800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
		800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
		800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
	800.1.12		Kesejahteraan Pegawai
		800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
		800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
		800.1.12.3	Tabungan Perumahan
		800.1.12.4	Bantuan Sosial
		800.1.12.5	Pakaian Dinas
		800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
		800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
		800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
		800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
		800.1.12.10	Rekam Medis
	800.1.13		Administrasi Perseorangan
		800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
		800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
		800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
		800.1.13.4	Sekretaris Daerah
		800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
	800.1.14		Penilaian Kompetensi
		800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
		800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	800.2.1		Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh
	800.2.2		Pendidikan dan Pelatihan
		800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
		800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
		800.2.2.4	Modul-modul diklat
		800.2.2.5	Panduan fasilitator
		800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
		800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
		800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
	800.2.3		Widyaiswara
		800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
		800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
		800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
		800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
	800.2.4		Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
		800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
		800.2.4.5	Sistem informasi diklat
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat

		800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
		800.2.5	Alumni
900	KEUANGAN		
	900.1	KEUANGAN DAERAH	
		900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
		900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
		900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
		900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
		900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
		900.1.2	Penyusunan Anggaran
		900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
		900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
		900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
		900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
		900.1.3	Pelaksanaan Anggaran
		900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
		900.1.3.2	Pendapatan
		900.1.3.3	Belanja
		900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
		900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
		900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
		900.1.3.7	Daftar Gaji
		900.1.3.8	Kartu Gaji
		900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
		900.1.3.10	Laporan Keuangan
		900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
		900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
		900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
		900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN), antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
		900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana
		900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
		900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
		900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya)
		900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
		900.1.4.10	Staff Appraisal Report
		900.1.4.11	Report /Laporan
		900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
		900.1.4.13	Completion Report/Annual Report

		900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
		900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
		900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
		900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
		900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
		900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
		900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
		900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
		900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
		900.1.7.3	Buku Rekening Bank
		900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
		900.1.7.5	Pembukuan anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
		900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
		900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
		900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
		900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD , antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
		900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
		900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
		900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
		900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank

		900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
		900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
		900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
		900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
		900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
		900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
		900.1.12	Anggaran Daerah
		900.1.12.1	Anggaran Daerah
		900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
		900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah
		900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
		900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
		900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
		900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
		900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
		900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan
		900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

f

		900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
		900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
		900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
		900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
		900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
		900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
		900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
		900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
		900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
		900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN II**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 29 TAHUN 2023**TANGGAL** : 5 JUNI 2023**TENTANG KODE PD/UPTD/CABANG DINAS**

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
1.	BIRO PEMERINTAHAN		PEMKES
1	BAGIAN KERJASAMA		PEMKES1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	PEMKES1.1
2.	BIRO HUKUM		HK
1	BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KABUPATEN/KOTA		HK1
2	BAGIAN BANTUAN HUKUM		HK2
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	HK2.1
3	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		EK
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	EK1.1
4.	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		PBJ
1	BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		PBJ1
2	BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK		PBJ2
3	BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/ JASA		PBJ3
	.1	Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa	PBJ3.1
6.	BIRO ORGANISASI		BO
1	BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN		BO.1
2	BAGIAN TATALAKSANA		BO.2
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	BO.2.1.
3	BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA		

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
5.	BIRO UMUM		BU
1	BAGIAN TATA USAHA		BU1
.1	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf ahli		BU1.1
2	BAGIAN RUMAH TANGGA		BU2
3	BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET		BU3
7.	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		AP
1	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH		AP1
.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro		AP1.1
2	BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		AP2
3	BAGIAN PROTOKOL		AP3
8.	SEKRETARIAT DPRD		SETWAN
1	BAGIAN UMUM		SETWAN1
.1	Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan		SETWAN1.1
2	BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH		SETWAN2
3	BAGIAN KEUANGAN		SETWAN3
9.	INSPEKTORAT DAERAH		INSP
1	SEKRETARIAT		INSP1
.1	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan		INSP1.1
.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		INSP1.3
2	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I		INSPI
3	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II		INSPII
4	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III		INSPIII
5	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV		INSPIV
6	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V		INSPV

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		PK
1	SEKRETARIAT		PK1
.1	Sub Bagian Keuangan		PK1.1
.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		PK1.2
2	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH		PK2
3	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS		PK3
4	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN		PK4
5	BIDANG KEBUDAYAAN		PK5
6	UPTD		UPK1....
7	CABANG DINAS		CPK1....
11	DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DINKES
1	SEKRETARIAT		DINKES1
.1	Sub Bagian Keuangan		DINKES1.1
.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		DINKES1.2
2	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES2
.1	Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Keluarga Berencana		DINKES2.1
.2	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga		DINKES2.2
3	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		DINKES3
.1	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		DINKES3.1
.2	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta Kesehatan Jiwa		DINKES3.2

4	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		DINKES4
	.1	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	DINKES4.
	.2	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	DINKES4.2
5	BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		DINKES5
	.1	Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	DINKES5.1
	.2	Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat SDM Kesehatan	DINKES5.2
6	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DINKES6
7	UPTD.....		UDINKES1...
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		PUPR
1	SEKRETARIAT		PUPR1
	.1	Sub Bagian Keuangan	PUPR1.1
	.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PUPR1.1
2	BIDANG BINA MARGA		PUPR2
	.1	Seksi Perencanaan	PUPR2.1
	.2	Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik	PUPR2.2
3	BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI		PUPR3
	.1	Seksi Perencanaan	PUPR3.1
	.2	Seksi Pembangunan Irigasi	PUPR3.2
4	BIDANG OPERASI SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI		PUPR4
	.1	Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigasi	PUPR4.1
	.2	Seksi Operasi Prasarana Sumber Daya Air	PUPR4.2

5	BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH		PUPR5
	.1	Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	PUPR5.1
	.2	Sub Koordinator Substansi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	PUPR5.2
6	BIDANG CIPTA KARYA		PUPR6
	.1	Seksi Perencanaan dan Pengendalian	PUPR6.1
	.2	Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	PUPR6.2
7	BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN		PUPR7
8	UPTD		UPUPR1....
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		SATPOLPP
1	SEKRETARIAT		SATPOLPP1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	SATPOLPP1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	SATPOLPP1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	SATPOLPP1.3
2	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SATPOLPP2
	.1	Seksi Operasi Dan Pengendalian	SATPOLPP2.1
	.2	Seksi Hubungan Kelembagaan	SATPOLPP2.2
3	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR		SATPOLPP3
	.1	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	SATPOLPP3.1
	.2	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	SATPOLPP3.2
4	BIDANG SUMBER DAYA APARATUR		SATPOLPP4
	.1	Seksi Pelatihan Dasar Dan Teknis Fungsional	SATPOLPP4.1
	.2	Seksi Substansi Kesamaptaan	SATPOLPP4.2

5	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		SATPOLPP5
	.1	Seksi Bina Potensi, Kewaspadaan Dan Mobilisasi	SATPOLPP5.1
	.2	Seksi Penanggulangan Kebakaran	SATPOLPP5.2
14.	DINAS SOSIAL		DINSOS
1	SEKRETARIAT		DINSOS1
	.1	Sub Bagian Keuangan	DINSOS1.1
	.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DINSOS1.2
2	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		DINSOS2
3	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN		DINSOS3
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL		DINSOS4
5	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS5
6	UPTD...		UDINSOS1...
15.	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		KTKT
1	SEKRETARIAT		KTKT1
	.1	Sub Bagian Keuangan	KTKT11
	.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	KTKT12
2	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI		KTKT2
3	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH		KTKT3
4	BIDANG KETENAGAKERJAAN		KTKT4
	.1	Seksi Penempatan, Pembinaan Dan Pemagangan Tenaga Kerja	KTKT4.1
	.2	Seksi Pengawasan Pengupahan Dan Jaminan Sosial	KTKT4.2

5	BIDANG KETRANSMIGRASIAN		KTKT5
	.1	Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	KTKT5.1
	.2	Sub Koordinator Substansi Pembinaan Sosial, Budaya dan Ekonomi	KTKT5.2
	.3	Sub Koordinator Substansi Penempatan, Pemindahan dan Sarana Prasarana	KTKT5.3
16.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		DP3A
1	SEKRETARIAT		DP3A1
	.1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DP3A1.1
2	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN		DP3A2
3	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK		DP3A3
4	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN		DP3A4
5	BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DP3A5
17.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		DPKP
1	SEKRETARIAT		DPKP1
	.1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DPKP1.1
2	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		DPKP2
3	BIDANG PERKEBUNAN		DPKP3
4	BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN		DPKP4
5	BIDANGPRASARANA SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN		DPKP5
6	UPTD...		UDPKP1

18.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		DLHK
1	SEKRETARIAT		DLHK1
.1	Sub Bagian Keuangan		DLHK1.1
.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		DLHK1.2
2	BIDANG PENATAAN DAN PEMANFAATAN		DLHK2
3	BIDANG PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN		DLHK3
4	BIDANG PEMBINAAN		DLHK4
5	BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL		DLHK5
6	UPTD...		UDLHK1..
7	CABANG DINAS...		CLHK1..
19.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		DPMD
1	SEKRETARIAT		DPMD1
.1	Sub Bagian Keuangan		DPMD1.1
.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		DPMD1.2
2	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT		DPMD2
3	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT		DPMD3
4	BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI DESA		DPMD4
5	BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA		DPMD5
20.	DINAS PERHUBUNGAN		DISHUB
1	SEKRETARIAT		DISHUB1
.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		DISHUB1.1
.2	Sub Bagian Keuangan		DISHUB1.2
.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		DISHUB1.3

2	BIDANG LALU LINTAS JALAN		DISHUB2
	.1	Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan	DISHUB2.1
	.2	Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DISHUB2.2
3	BIDANG ANGKUTAN JALAN		DISHUB3
	.1	Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal	DISHUB3.1
	.2	Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang	DISHUB3.2
4	BIDANG KEPELABUHANAN		DISHUB4
	.1	Seksi Pembangunan Pelabuhan	DISHUB4.1
	.2	Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan	DISHUB4.2
5	BIDANG ANGKUTAN PELAYARAN		DISHUB5
	.1	Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran	DISHUB5.1
	.2	Seksi Angkutan Penyeberangan	DISHUB5.2
6	UPTD...		UDISHUB1...
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI		KOMINFO
1	SEKRETARIAT		KOMINFO1
	.1	Sub Bagian Keuangan	KOMINFO1.1
	.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	KOMINFO1.2
2	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		KOMINFO2
	.1	Sub Koordinator Substansi Pengelolaan data dan statistik sektoral	KOMINFO2.1
3	BIDANG PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI		KOMINFO3

4	BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	KOMINFO4
5	BIDANG LAYANANE-GOVERNMENT	KOMINFO5
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP
1	SEKRETARIAT	DPMPTSP1
.1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DPMPTSP1.1
6	UPTD...	UDPMPTSP1..
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PPO
1	SEKRETARIAT	PPO1
.1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PPO1.1
2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA	PPO2
3	BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA	PPO3
4	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	PPO4
5	BIDANGPENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	PPO5
6	UPTD...	UPPO1...
24.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ARPUS
1	SEKRETARIAT	ARPUS1
.1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	ARPUS1.1
2	BIDANG PENGELOLAAN ARSIP	ARPUS2
3	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	ARPUS3
4	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	ARPUS4
5	BIDANGLAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	ARPUS5

25.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKP
1	SEKRETARIAT		DKP1
.1	Sub Bagian Keuangan		DKP1.1
.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		DKP1.2
2	BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PERIKANAN BUDIDAYA		DKP2
3	BIDANG PERIKANAN TANGKAP		DKP3
4	BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKP4
5	BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKP5
6	UPTD...		UDKP1...
7	CABANG DINAS...		CDKP1...
26.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		PAREKRAF
1	SEKRETARIAT		PAREKRAF1
.1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		PAREKRAF1.1
2	BIDANG DESTINASI PARIWISATA		PAREKRAF2
3	BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		PAREKRAF3
4	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA		PAREKRAF4
5	BIDANG KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		PAREKRAF5
6	UPTD...		UPAREKRAF1..
27.	DINAS PETERNAKAN		DISNAK
1	SEKRETARIAT		DISNAK1
.1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		DISNAK1.1
2	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETERNAKAN		DISNAK2

3	BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK		DISNAK3
4	BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		DISNAK4
5	BIDANGAGRIBISNIS DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN		DISNAK5
6	UPTD...		UDISNAK1...
28.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		PERINDAG
1	SEKRETARIAT		PERINDAG1
	.1	Sub Bagian Keuangan	PERINDAG1.1
	.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PERINDAG1.2
2	BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI		PERINDAG2
3	BIDANG SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI		PERINDAG3
4	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN		PERINDAG4
5	BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA		PERINDAG5
6	UPTD...		UPERINDAG1...
29.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		ESDM
1	SEKRETARIAT		ESDM1
	.1	Sub Bagian Keuangan	ESDM1.1
	.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	ESDM1.2
2	BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH		ESDM2
3	BIDANG MINERAL DAN BATUBARA		ESDM3
4	BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN		ESDM4
5	BIDANG KETENAGALISTRIKAN		ESDM5
6	UPTD...		UESDM1...
7	CABANG DINAS...		CESDM1...

30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		BP4D
1	SEKRETARIAT		BP4D1
.1	Sub Bagian Keuangan		BP4D1.1
.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		BP4D1.2
2	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		BP4D2
3	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		BP4D3
4	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		BP4D4
5	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		BP4D5
6	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BP4D6
31	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		BPAD
1	SEKRETARIAT		BPAD1
.1	Sub Bagian Keuangan		BPAD1.1
.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		BPAD1.2
2	BIDANG PENDAPATAN I		BPAD2
.1	Sub Bidang Pendataan dan Penetapan		BPAD2.1
.2	Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan		BPAD2.2
3	BIDANG PENDAPATAN II		BPAD3
.1	Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan I		BPAD3.1
.2	Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan II		BPAD3.2
4	BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET		BPAD4
.1	Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan		BPAD4.1
.2	Sub Bidang Penatausahaan Aset		BPAD4.2

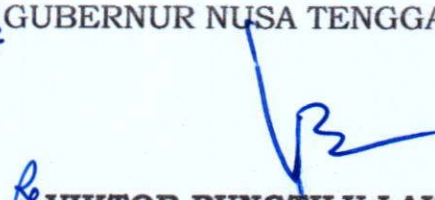
5	BIDANG PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGAMANAN ASET		BPAD5
	.1	Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	BPAD5.1
	.2	Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset	BPAD5.2
6	UPTD...		UBPAD1....
32	BADAN KEUANGAN DAERAH		BKUD
1	SEKRETARIAT		BKUD1
	.1	Sub Bagian Keuangan	BKUD1.1
	.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BKUD1.2
2	BIDANG ANGGARAN		BKUD2
	.1	Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan	BKUD2.1
	.2	Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	BKUD2.2
3	BIDANG PERBENDAHARAAN		BKUD3
	.1	Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	BKUD3.1
	.2	Sub Bidang Pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan	BKUD3.2
4	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN		BKUD4
	.1	Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan	BKUD4.1
	.2	Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan	BKUD4.2
5	BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA		BKUD5
	.1	Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I	BKUD5.1
	.2	Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II	BKUD5.2

33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		BKD
1	SEKRETARIAT		BKD1
.1	Sub Bagian Keuangan		BKD1.1
.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		BKD1.2
2	BIDANG PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN SISTEM INFORMASI PEGAWAI		BKD2
3	BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI		BKD3
4	BIDANG MUTASI PEGAWAI DAN Pensiun PEGAWAI		BKD4
5	BIDANG DISIPLIN DAN KORPRI		BKD5
6	UPTD		UBKD.1.
34.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		BPSDMD
1	SEKRETARIAT		BPSDMD1
.1	Sub Bagian Keuangan		BPSDMD1.1
.2	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		BPSDMD1.2
2	BIDANG KOMPETENSI MANAJERIAL, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL		BPSDMD2
3	BIDANG KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL		BPSDMD3
4	BIDANG SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN		BPSDMD4
5	UPTD...		UBPSDMD1...
35.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		BPBD
1	SEKRETARIAT		BPBD1
.1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		BPBD1.1
2	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		BPBD2
3	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		BPBD3
4	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		BPBD4
5	UPTD...		UBPBD1...

36.	BADAN PENGHUBUNG DAERAH		BPD
1	SUB BAGIAN TATA USAHA		BPD1
2	SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		BPD2
3	SUB BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		BPD3
4	SUB BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KEHUMASAN		BPD4
37.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN		BATAS
1	SEKRETARIAT		BATAS1
.1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		BATAS1.1
2	BIDANG PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJASAMA		BATAS2
3	BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN		BATAS3
4	BIDANG MONITORING DAN EVALUASI		BATAS4
38.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		KESBANG
1	SEKRETARIAT		KESBANG1
.1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		KESBANG1.1
2	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKLTER BANGSA		KESBANG2
3	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI		KESBANG3
4	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		KESBANG4
5	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK		KESBANG5

39.	RSUD Prof. Dr. W. Z. JOHANNES KUPANG		RSUD
1	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN		RSUD1
	.1	BIDANG PELAYANAN MEDIK	RSUD1.1
	.2	BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	RSUD1.2
2	WAKIL DIREKTUR PENUNJANG PELAYANAN		RSUD2
	.1	BIDANG PENUNJANG PELAYANAN MEDIK	RSUD2.1
	.2	BIDANG PENUNJANG PELAYANAN NON MEDIK	RSUD2.2
3	WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM		RSUD3.
	.1	BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI	RSUD3.1
	.2	BAGIAN KEUANGAN	RSUD3.2
	.3	BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	RSUD3.3

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Re. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023

TENTANG TEKNIK PENCANTUMAN NOMOR

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, meliputi surat edaran, surat dinas/ surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat pengantar, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat kuasa, surat undangan, surat keterangan melaksanakan tugas, surat keterangan, nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, telaahan staf, pegumuman, laporan, rekomendasi, telegram, berita acara, notulen, piagam, sertifikat, STTP dan piagam.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor Urut/ Nomor Kode PD/UPTD/Cabang Dinas.

Contoh:

Surat dinas/surat biasa dari Biro Organisasi mengenai pelayanan publik yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi (permasalahan pelayanan publik)	000.8.3.4	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Organisasi
Nomor Urut	78	Diisi oleh petugas TU pada Biro Organisasi
Nomor Kode PD	BO21	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Organisasi
Nomor Naskah Dinas surat dinas/surat biasa adalah sebagai berikut: 000.8.3.4/ 78/ BO21		

Instruksi Gubernur.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor Urut/ Nomor Kode PD/UPTD/Cabang Dinas

Contoh:

Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Tuberkolosis.

JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi (permasalahan penyakit menular tuberkolosis)	400.7.8.1	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Dinkes
Nomor Urut	02	Diisi oleh petugas TU pada Dinkes
Nomor Kode PD	Dinkes32	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Dinkes
Nomor Instruksi Gubernur adalah sebagai berikut: 400.7.8.1/02/Dinkes32		

Naskah Perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor urutan/ Nomor Kode Perjanjian/ Tahun Pembuatan.

Contoh :Perjanjian Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi	600.4.1	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama
Nomor Urut	09	
Nomor Kode Perjanjian	PERJ-1	
Tahun Pembuatan	2023	
Nomor Naskah Perjanjian adalah sebagai berikut: 600.4.1/09/PERJ-I/ 2023		

Standarisasi penomoran Naskah Dinas UPTD :

Contoh penulisan :

400.3.4/10/UPK1

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 29 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 JUNI 2023

TENTANG NOMOR KODE PERJANJIAN

KODE PERJANJIAN	KETERANGAN
PERJ- I	PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
PERJ-II	PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
PERJ-III	PERJANJIAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Pasal 11

- (1) Penomoran Naskah Dinas pada UPTD/Cabang Dinas dan lembaga selain PD ditetapkan oleh masing-masing UPTD/Cabang Dinas dan lembaga bersangkutan.
- (2) Nomor kode PD yang tercantum dalam penomoran Naskah Dinas pada UPTD/Cabang Dinas dan lembaga selain PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh PD induk.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 JUNI 2023

▮ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ▮

▮ **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH
▮ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ▮

▮ **KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR